

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan objek pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Papua. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah organisasi yang bertugas dalam pemeriksaan transparansi dalam pelaporan dan praktik pengelolaan realisasi anggaran sektor publik, mengawasi realisasi anggaran daerah yang diperoleh dari anggaran pemerintah pusat dan juga bertujuan mengembangkan aspek-aspek ekonomi yang terdapat di daerah tersebut.

Tugas dan fungsi BPKP bukan hanya melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat represif atau pemeriksaan, yang jauh lebih penting adalah upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu merupakan tugas pengawasan dari Kantor BPKP yang juga bersifat preventif. Fungsi pengawasan preventif ini merupakan peranan penting dan strategis dari auditor internal, fungsi pengawasan preventif ini dikenal juga dengan istilah *quality assurance*, yaitu mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik sehingga dapat terhindar dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP adalah audit, Dalam melakukan audit yang sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan No: PER/05/M.PAN/03/2008 mendasarkan pada standar audit yang telah ditetapkan termasuk standar umum audit kinerja dan audit investigatif. Standar audit yang diterapkan selain memberikan jaminan kualitas audit juga untuk menghindari adanya tuntutan dan ketidakpuasan terhadap hasil audit yang dilakukan oleh BPKP.

Konsultan auditor BPKP memiliki dua peran. Pertama, sebagai pemberi nasehat, dalam hal ini membantu pembuatan kebijakan dengan menilai program

atau kebijakan yang sedang berjalan, proses bisnis, serta berbagai informasi tentang praktek-praktek terbaik dalam rangka memberikan nilai tambah bagi organisasi. Kedua, memberikan pendidikan dan pelatihan baik diklat teknis ataupun diklat penjenjangan. Di samping itu, seorang auditor harus mampu menjadi pengawal setia bagi pencapaian tujuan organisasi dan terciptanya nilai bagi organisasi. Auditor harus mampu memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk mendorong terwujudnya *good public governance*.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, serta dilengkapi juga dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Target tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahunnya. Visi Perwakilan BPKP Provinsi Papua sejalan dengan BPKP Pusat yaitu menjadi auditor internal pemerintah RI berkelas dunia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan kondisi impian yang diharapkan dapat mendorong seluruh pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan setiap kegiatan dengan kualitas kelas dunia.

Hasil dari pengawasan adalah untuk mengetahui rekomendasi strategis, proses dari pelaksanaan pengawasan yang telah sesuai dengan standar profesi, kegiatan-kegiatan dukungan yang sinergis dan terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Papua menetapkan tiga tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai, Berikut tiga tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua yaitu:

1. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif di wilayah Papua;
2. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Papua dan;

3. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Papua.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Tuntutan dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Indonesia semakin meningkat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya pelaksanaan pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Setiap entitas pemerintahan baik pusat maupun daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan selama satu periode untuk melihat apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik atau tidak.

Menurut Agoes (2017:4) audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Pada umumnya, audit dibagi menjadi dua jenis, yaitu audit sektor publik dan audit sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba, seperti sektor pemerintahan daerah (Pemda), BUMN/BUMD tertentu dan instansi lain yang berkaitan dengan keuangan negara, sedangkan audit sektor swasta dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba.

Salah satu lembaga yang bergerak di bidang pengawasan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Fungsi dari BPKP yaitu, melakukan audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, serta badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan audit kepada instansi penyidik dan pemerintah lainnya (BPKP, 2019). Keberhasilan suatu organisasi mengemban misi pemeriksaan tergantung pada kinerja auditornya, termasuk pula kinerja auditor internal

pemerintah pada BPKP Provinsi Papua yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan dan keuangan yang dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan.

Kasus yang pernah dijumpai dan dimuat di media elektronik oleh (Jubi, 2020), hasil audit selama 5 tahun terakhir (2015-2020) oleh auditor perwakilan BPKP Provinsi Papua yang kemudian diserahkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menemukan sebanyak 10 penugasan kasus penyalahgunaan keuangan negara dengan nilai kerugian yang ditimbulkan kurang lebih Rp.53,6 Miliar. Kesepuluh penugasan kasus yang telah dilimpahkan, merupakan hasil audit penggunaan dana APBD/APDN di instansi, badan, maupun lembaga pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua. Salah satu dari kesepuluh penugasan kasus penyalahgunaan keuangan negara yang telah dilimpahkan itu, adalah Perusahaan Daerah (PD) Irian Bhakti Papua. Hal ini sebagaimana dikatakan Kepala Perwakilan BPKP Papua Drs. Bambang Setiawan mengatakan, dari total jumlah kerugian yang dialami oleh negara yakni Rp.53,6 miliar telah dikembalikan sebanyak Rp.781,63 Juta kepada kas negara. Hal ini membuktikan bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Papua memiliki kompetensi dalam mengaudit laporan keuangan negara, sehingga mampu memberikan kualitas hasil audit yang baik, sehingga mampu menemukan kasus penyalahgunaan keuangan negara.

Kemudian kasus berikutnya yang dimuat di media elektronik oleh (Jubi, 2019), yaitu hasil laporan audit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Papua (APBD-P) tahun 2018 yang di audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua dan kemudian diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempublikasikan bahwa Proyek peningkatan ruas jalan Kemiri-Depapre di Provinsi Papua senilai Rp.89,5 miliar telah terjadi indikasi kerugian bagi Negara. Dalam pemeriksaan BPKP menemukan bahwa indikasi kerugian sekitar Rp.42 miliar atau hampir setengah dari nilai proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. Bintuni Energy Persada.

Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kompetensi merupakan salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh auditor guna menjamin kualitas audit yang dihasilkan. Sehingga dari kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua, dapat mengungkap penyalahgunaan keuangan negara khususnya pada APBD/APDN.

Menurut penelitian (Hasanah, 2019), bahwa hasil yaitu kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rivani, 2018), memberikan hasil yaitu kompetensi, independensi dan etika secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan (Fitriani, 2018), menjelaskan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian (Triana, 2017), membuktikan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dan etika juga tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa independensi dan etika auditor tidak dapat memengaruhi baik atau buruknya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Berdasarkan contoh kasus dan penelitian-penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara kompetensi, independensi, dan etika terhadap kualitas audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua, dan menuliskan hasil penelitiannya ke dalam proposal dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika terhadap Kualitas Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua”.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia tentang korupsi membuat masyarakat resah akan hal tersebut, ini dapat menjadi perhatian khususnya bagi para auditor dalam melakukan audit. Kualitas audit sangatlah penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Agar

dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas serta dapat dipercaya, seorang auditor disarankan agar memiliki kompetensi, independensi, dan etika.

Kemungkinan seorang auditor dalam menemukan pelanggaran yang terjadi tergantung pada kompetensi yang dimiliki auditor tersebut. Independensi seorang auditor dapat dinilai apabila auditor tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka penelitian ini menimbulkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi, independensi, etika dan kualitas audit pada auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Papua?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan kompetensi, independensi dan etika terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Papua?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial kompetensi terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Papua?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial independensi terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Papua?
5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial etika terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Papua?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi, independensi, etika, dan kualitas audit pada auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Papua.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, dan etika secara simultan terhadap kualitas audit pada auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Papua.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi secara parsial terhadap kualitas hasil audit Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Papua.

4. Untuk mengetahui pengaruh independensi secara parsial terhadap kualitas audit pada auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Papua.
5. Untuk mengetahui pengaruh etika secara parsial terhadap kualitas audit pada auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Papua.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil dari penelitian ini adalah Peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat sebagai masukan kepada perwakilan auditor BPKP Provinsi Papua dalam meningkatkan kualitas audit dengan diketahuinya pengaruh kompetensi, independensi dan etika terhadap kualitas hasil audit.

### **1.5.2 Aspek Teoritis**

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain bagi Akademisi dan Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai kompetensi, independensi, dan etika terhadap kualitas audit dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan berisi tentang penjelasan ringkas laporan penelitian, yang menunjukkan gambaran mengenai materi pembahasan dari bab 1 sampai bab 5. Bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari hasil penelitian ini. Maka sistematika penulisan penelitian ini akan digambarkan secara garis besar sebagai berikut:

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab 1 menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisi fenomena penelitian serta argumentasi teoritis atas pemilihan topik sesuai dengan latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan hasil yang diinginkan dari penelitian ini, dan kegunaan penelitian yang dijelaskan dengan dua aspek yaitu teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara garis besar.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab 2 menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisi lingkup penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab 3 menjelaskan mengenai metode penelitian yang berisi jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data serta pengujian hipotesis yang akan peneliti lakukan.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab 4 menjelaskan mengenai hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya serta menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab 5 menjelaskan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, dan saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.